

Optimalisasi Program KIPK dalam Pendidikan Kewarganegaraan untuk mewujudkan generasi unggul menuju Indonesia Emas 2045

Salwa Mayada Al'arifin

Program Studi Hukum Tata Negara, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang
e-mail: 240203110126@student-uin-malang.ac.id

Kata Kunci:

Program KIPK, Pendidikan Kewarganegaraan, Generasi Muda Unggul, Indonesia Emas 2045

Keywords:

KIPK Program, Citizenship Education, Superior Young Generation, Golden Indonesia 2045

ABSTRAK

Optimalisasi Program Kartu Indonesia Pintar Kuliah (KIPK) dalam Pendidikan Kewarganegaraan memiliki peran strategis dalam membentuk generasi muda yang unggul, cerdas, dan berkarakter. Pendidikan Kewarganegaraan berkontribusi pada pembentukan nilai moral, penguatan pendidikan anti korupsi, integrasi bangsa, pengenalan identitas nasional serta pemahaman hak dan kewajiban sebagai warga negara. Artikel ini bertujuan untuk menyoroti pentingnya sinergi antara program KIPK dan pendidikan kewarganegaraan dalam kehidupan sehari-hari guna mencetak generasi yang berdaya saing tinggi. Adapun metode penelitian yang digunakan dalam penulisan ini menggunakan

kajian pustaka dengan menganalisis berbagai literatur dari jurnal, buku, skripsi, dan sumber relevan lainnya. Hasil kajian menunjukkan bahwa program KIPK jika dioptimalkan melalui pendidikan kewarganegaraan, ternyata akan memberikan dampak positif yang signifikan terhadap kualitas generasi muda baik dari segi intelektual maupun karakter kewarganegaraan. Implementasi ini diyakini dapat mendukung visi besar Indonesia Emas 2045 dengan menciptakan sumber daya manusia yang unggul dan berkarakter baik.

ABSTRACT

Optimizing the Indonesian Smart College Card (KIPK) Program in Citizenship Education has a strategic role in forming a young generation who is superior, intelligent and has character. Citizenship education contributes to the formation of moral values, strengthening anti-corruption education, national integration, introducing national identity and understanding the rights and obligations as citizens. This article aims to highlight the importance of synergy between the KIPK program and citizenship education in everyday life in order to produce a highly competitive generation. The research method used in this writing uses a literature review by analyzing various literature from journals, books, theses and other relevant sources. The results of the study show that if the KIPK program is optimized through citizenship education, it will have a significant positive impact on the quality of the younger generation both in terms of intellectual and civic character. It is believed that this implementation can support the grand vision of Golden Indonesia 2045 by creating superior human resources with good character.

Pendahuluan

Pendidikan di Indonesia memegang peranan strategis dalam membangun sumber daya manusia unggul guna mencapai visi Indonesia Emas 2045. Sebagai pilar utama dalam mencetak generasi penerus bangsa, pendidikan tidak hanya bertujuan meningkatkan kompetensi akademik akan tetapi juga menanamkan nilai moral, karakter, dan daya saing yang diperlukan untuk menghadapi tantangan globalisasi dan revolusi industri 4.0 (Ghufron, 2018). Dalam konteks ini, Program Kartu Indonesia Pintar



This is an open access article under the [CC BY-NC-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/) license.

Copyright © 2023 by Author. Published by Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

Kuliah (KIPK) menjadi salah satu kebijakan penting pemerintah untuk mendukung pemerataan akses pendidikan khususnya bagi mahasiswa dari keluarga kurang mampu. KIPK tidak hanya menyediakan bantuan finansial akan tetapi juga menjadi katalis dalam mengoptimalkan pendidikan kewarganegaraan guna membentuk generasi muda yang unggul, berkarakter, dan berdaya saing tinggi (Ahmad et al., 2024).

Program KIPK memiliki kontribusi signifikan dalam mewujudkan pendidikan inklusif sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Program ini dirancang untuk mendukung pengembangan potensi individu melalui pendidikan yang holistik sehingga peserta didik tidak hanya cerdas secara intelektual akan tetapi, juga memiliki kesadaran akan hak dan kewajibannya sebagai warga negara. Pendidikan kewarganegaraan sebagai bagian integral dari sistem pendidikan memiliki peran yang sangat strategis dalam membentuk karakter generasi muda (Fauzi, 2013). Pendidikan ini tidak hanya berfokus pada penguasaan pengetahuan tentang negara dan konstitusi namun juga menanamkan nilai-nilai demokrasi, toleransi, hak asasi manusia, serta tanggung jawab sosial yang menjadi landasan utama dalam membangun masyarakat madani.

Dalam implementasinya, program KIPK membuka peluang besar bagi generasi muda untuk mendapatkan akses pendidikan tinggi yang berkualitas. Hal ini penting karena pendidikan tinggi merupakan salah satu komponen utama dalam mencetak generasi yang mampu bersaing di kancah global. Melalui KIPK peran mahasiswa tidak hanya didorong untuk meraih prestasi akademik tetapi juga dilatih untuk memiliki kecerdasan emosional, keterampilan sosial, serta kemampuan berpikir kritis (Rohaeni & Saryono, 2018). Pendidikan kewarganegaraan yang terintegrasi dalam kurikulum perguruan tinggi memberikan landasan kuat bagi mahasiswa untuk memahami peran mereka sebagai warga negara yang baik (good citizenship) dan cerdas (smart citizenship).

Hal ini sesuai dengan pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 yang mana menegaskan bahwa pendidikan nasional bertujuan mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman, bertakwa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Dalam konteks ini pendidikan kewarganegaraan berperan penting sebagai wahana untuk menanamkan nilai-nilai moral, pendidikan anti korupsi, pengenalan identitas bangsa, dan penguatan integrasi nasional. Dengan demikian adanya peran optimalisasi program KIPK melalui pendidikan kewarganegaraan dapat menjadi langkah strategis dalam membentuk generasi muda yang unggul dan berkarakter kuat.

Studi terdahulu menunjukkan bahwa pendidikan kewarganegaraan memiliki dampak signifikan dalam meningkatkan kesadaran generasi muda terhadap nilai-nilai demokrasi dan hak asasi manusia. Penelitian yang dipublikasikan dalam *Journal of Social Science Education* mengungkapkan bahwa pendidikan kewarganegaraan mampu meningkatkan partisipasi aktif masyarakat dalam proses demokrasi dan memperkuat kohesi sosial. Selain itu hasil penelitian yang diterbitkan dalam *International Journal of Educational Research* juga menunjukkan bahwa pendidikan kewarganegaraan dapat mengembangkan kemampuan analitis dan kritis siswa yang sangat penting dalam menghadapi tantangan globalisasi dan dinamika sosial-politik (Saryono, 2024).

Sejalan dengan itu, data dari UNESCO menunjukkan bahwa negara-negara yang mengintegrasikan pendidikan kewarganegaraan dalam sistem pendidikannya cenderung memiliki tingkat partisipasi masyarakat yang lebih tinggi dalam berbagai bidang, kesadaran hak asasi manusia yang lebih baik, serta masyarakat yang lebih toleran dan cinta tanah air. Hal ini bahkan diperkuat juga dari data dari International Civic and Citizenship Education Study (ICCS) yang juga menunjukkan bahwa siswa dan mahasiswa yang menerima pendidikan kewarganegaraan memiliki pemahaman yang lebih baik tentang identitas nasional, hak asasi manusia, dan demokrasi (Widiyanto & Istiqomah, 2023).

Di sekolah menengah atas, pendidikan kewarganegaraan lebih menekankan pada nilai dan norma sosial yang relevan dengan pembentukan karakter dan moral siswa. Sementara itu, di perguruan tinggi, pendidikan kewarganegaraan berfokus pada pengembangan kemampuan berpikir kritis dan analitis mahasiswa untuk menilai kebijakan publik serta memahami peran mereka dalam Masyarakat (Sulaiman, 2016). Optimalisasi program KIPK dalam pendidikan kewarganegaraan memberikan peluang besar bagi mahasiswa untuk memperdalam pemahaman mereka tentang hak dan kewajiban sebagai warga negara. Program ini juga dapat membantu mahasiswa mengatasi hambatan ekonomi yang sering menjadi kendala utama dalam melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi (Gutama et al., 2022). Dengan akses yang lebih luas terhadap pendidikan tinggi mahasiswa dapat mengembangkan potensi mereka secara maksimal dan berkontribusi secara signifikan dalam mewujudkan visi Indonesia Emas 2045.

Dengan begitu, adanya sinergi antara program KIPK dan pendidikan kewarganegaraan diharapkan mampu mencetak generasi muda yang tidak hanya unggul secara intelektual, tetapi juga memiliki karakter yang kuat, kemampuan kepemimpinan, serta kesadaran sosial yang tinggi. Generasi seperti ini sangat dibutuhkan untuk menghadapi tantangan globalisasi, revolusi industri 4.0 dan berbagai dinamika sosial-politik yang kompleks. Berdasarkan latar belakang tersebut artikel ini bertujuan untuk menjelaskan secara komprehensif bagaimana optimalisasi program KIPK dalam pendidikan kewarganegaraan dapat berkontribusi dalam mencetak generasi muda yang unggul dan berkarakter. Yang mana diharapkan hasil dari kajian ini dapat memberikan wawasan yang mendalam tentang pentingnya sinergi antara kebijakan pendidikan dan penguatan karakter generasi muda untuk mewujudkan visi besar Indonesia Emas 2045.

Penelitian ini menggunakan metode literatur review untuk mengkaji relevansi dan efektivitas Program Kartu Indonesia Pintar Kuliah (KIPK) dalam optimalisasi Pendidikan Kewarganegaraan guna mencetak generasi muda unggul menuju Indonesia Emas 2045. Literatur review ini sendiri merupakan pendekatan sistematis yang digunakan untuk menganalisis, mengkritisi, dan mensintesis hasil penelitian yang telah ada guna mengembangkan pemahaman teoritis serta menghasilkan perspektif baru (Sulistyawati, 2018). Proses pengumpulan data dilakukan dengan mengakses berbagai sumber yang relevan meliputi jurnal nasional dan internasional, buku akademik, skripsi, laporan penelitian, artikel ilmiah, serta dokumen kebijakan terkait KIPK dan Pendidikan Kewarganegaraan. Data yang terkumpul difokuskan pada aspek implementasi KIPK

dalam mendukung pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan, pembentukan karakter generasi muda, serta kontribusinya terhadap visi Indonesia Emas 2045.

Analisis data dilakukan dengan pendekatan deskriptif analitis yaitu mendeskripsikan beberapa temuan dari literatur yang ada, kemudian mengidentifikasi pola dan hubungan serta implikasi praktisnya. Penulis juga menggunakan kerangka kerja teoritis untuk memahami hubungan antara KIPK dan Pendidikan Kewarganegaraan, khususnya dalam hal pembentukan nilai moral, pendidikan anti korupsi, penguatan identitas bangsa, dan pemahaman hak serta kewajiban warga negara. Selain itu, metode ini juga melibatkan kegiatan membaca kritis terhadap literatur untuk mengevaluasi keabsahan, reliabilitas, dan relevansi data. Proses ini dilakukan dengan mengacu pada teknik yang diuraikan oleh (Sugiyono, 2013) yaitu pengumpulan data pustaka, dengan cara membaca secara mendalam, mencatat poin-poin penting, serta mengelola bahan bacaan untuk menghasilkan sintesis yang terstruktur dan mendalam.

Metode literatur review ini bertujuan tidak hanya untuk menguji teori yang telah ada akan tetapi juga mengembangkan teori baru yang relevan dengan konteks modern. Dengan pendekatan ini, penelitian diharapkan dapat memberikan kontribusi nyata terhadap optimalisasi Program KIPK melalui Pendidikan Kewarganegaraan dalam mewujudkan generasi unggul yang siap menyongsong Indonesia Emas 2045.

Pembahasan

Konsep Optimalisasi Program KIPK dalam Pendidikan Kewarganegaraan

Program Kartu Indonesia Pintar Kuliah (KIPK) menjadi salah satu instrumen strategis dalam upaya pemerintah untuk memastikan akses pendidikan yang inklusif, terutama bagi kelompok masyarakat prasejahtera. Tidak hanya berfungsi sebagai bantuan finansial, program ini juga menjadi wahana penguatan pendidikan kewarganegaraan. Pendidikan kewarganegaraan berperan penting dalam mencetak generasi muda yang tidak hanya unggul dalam ilmu pengetahuan tetapi juga memiliki karakter kebangsaan yang kuat. Menurut (Fauzi, 2013), pendidikan kewarganegaraan adalah sarana strategis untuk meningkatkan kesadaran generasi muda terhadap hak, kewajiban, dan identitas bangsa. Dukungan KIPK memberikan akses pendidikan yang lebih luas bagi pelajar dari berbagai latar belakang ekonomi sehingga mereka memiliki kesempatan untuk memahami dan menerapkan nilai-nilai kewarganegaraan dalam kehidupan sehari-hari. Dalam konteks ini, pendidikan kewarganegaraan yang terintegrasi dengan KIPK menjadi alat transformasi sosial yang dapat membentuk generasi muda berintegritas dan siap menghadapi tantangan global.

Optimalisasi KIPK dalam pendidikan kewarganegaraan mencakup berbagai aspek, termasuk penyediaan fasilitas pendidikan, pelatihan keterampilan, dan pengembangan wawasan kewarganegaraan yang lebih holistik. Hal ini sejalan dengan penelitian (Anggono & Damaitu, 2021) yang menunjukkan keberhasilan pendidikan kewarganegaraan di Nigeria dalam meredam konflik antar etnis dan meningkatkan rasa nasionalisme di negara dengan masyarakat yang beragam. Di Indonesia, implementasi pendidikan kewarganegaraan melalui KIPK juga memberikan kesempatan bagi pelajar untuk memahami pentingnya toleransi, keberagaman, dan persatuan bangsa. Nilai-nilai

ini menjadi landasan utama dalam membangun masyarakat yang harmonis menuju pencapaian visi Indonesia Emas 2045. Dukungan dari KIPK memastikan bahwa masyarakat dari berbagai latar belakang ekonomi, termasuk mereka yang kurang mampu, dapat merasakan manfaat pendidikan ini. Dengan demikian, KIPK berkontribusi dalam mendorong pemerataan pendidikan kewarganegaraan sebagai upaya membangun kesadaran kolektif terhadap pentingnya kebangsaan (Aziz, 2019).

Selain itu, program ini juga mendukung pembentukan karakter generasi muda. Pendidikan kewarganegaraan yang didukung oleh KIPK tidak hanya menanamkan nilai-nilai moral tetapi juga membangun kemampuan berpikir kritis, adaptif, dan kreatif. (Sulaiman, 2016) menegaskan bahwa pendidikan kewarganegaraan di perguruan tinggi yang didukung oleh KIPK memainkan peran penting dalam menciptakan mahasiswa yang memiliki moral baik dan memahami nilai-nilai demokrasi. Generasi muda dengan karakter seperti ini diharapkan mampu bersaing secara global sekaligus tetap menjunjung tinggi identitas dan nilai-nilai kebangsaan. Lebih lanjut, (Fauzi, 2013) menjelaskan bahwa implementasi pendidikan karakter berbasis kewarganegaraan merupakan salah satu strategi terbaik untuk mencetak generasi unggul. Generasi ini tidak hanya akan menjadi individu yang cerdas dan bermoral tetapi juga motor penggerak utama dalam pembangunan bangsa. Dengan demikian, KIPK tidak hanya menjadi bantuan pendidikan tetapi juga alat strategis untuk mempersiapkan generasi muda sebagai agen perubahan. (Prasasti & Prakoso, 2020).

Selain itu, perlu ada kerja sama yang erat antara lembaga pendidikan, masyarakat, dan pemerintah untuk menciptakan ekosistem pendidikan kewarganegaraan yang inklusif dan berkelanjutan. Sehingga dapat diketahui bahwasanya KIPK adalah program yang memiliki potensi besar dalam mendukung pendidikan kewarganegaraan. Dengan memberikan akses pendidikan yang merata, mendukung pembentukan karakter, dan menanamkan nilai-nilai kebangsaan, KIPK dapat menjadi salah satu pilar utama dalam menciptakan generasi muda yang unggul dan berintegritas. Generasi inilah yang akan menjadi motor penggerak dalam mewujudkan visi Indonesia sebagai bangsa yang maju, adil, dan makmur pada tahun 2045. Program Kartu Indonesia Pintar Kuliah (KIPK) memiliki peran penting dalam memastikan akses pendidikan yang inklusif dan merata. Program ini tidak hanya membantu kelompok ekonomi lemah, akan tetapi juga memperkuat implementasi pendidikan kewarganegaraan dalam mencetak generasi unggul yang berpengetahuan luas dan memiliki karakter kebangsaan yang kuat. Menurut (Kusumawardani et al., 2024) adanya peran pendidikan kewarganegaraan merupakan sarana strategis untuk meningkatkan kesadaran generasi muda terhadap hak, kewajiban, dan identitas bangsa. Dukungan KIPK dalam pendidikan kewarganegaraan berfungsi sebagai alat transformasi sosial untuk membentuk generasi muda yang berintegritas.

Program ini juga mencakup penyediaan fasilitas pendidikan, pelatihan keterampilan, dan pengembangan wawasan kewarganegaraan yang lebih holistik. Pendapat ini sejalan dengan penelitian (Anggono & Damaitu, 2021) yang menunjukkan bahwa pendidikan kewarganegaraan di Nigeria mampu meredam konflik antar etnis dan meningkatkan nasionalisme di negara dengan latar belakang masyarakat plural. Implementasi serupa di Indonesia melalui KIPK memberikan kesempatan bagi pelajar untuk memahami

pentingnya toleransi, keberagaman, dan persatuan bangsa sebagai dasar menuju Indonesia Emas 2045. Sebagaimana dijelaskan oleh (Saryono, 2024) pendidikan kewarganegaraan adalah kewajiban bagi setiap pelajar dari jenjang sekolah dasar hingga perguruan tinggi sebagaimana diatur dalam Pasal 37 Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Dukungan KIPK memastikan semua lapisan masyarakat, terutama yang kurang mampu, dapat merasakan manfaat pendidikan kewarganegaraan. Program ini juga bertujuan untuk mendukung pembentukan karakter generasi muda agar mereka dapat menjadi warga negara yang cerdas, bermoral baik, dan siap bersaing dalam era globalisasi. (Widiyanto & Istiqomah, 2023) menegaskan bahwa pendidikan kewarganegaraan di perguruan tinggi yang kini didukung oleh KIPK, berperan penting dalam membangun karakter moral dan demokrasi. Selain itu, penelitian oleh (Ghufron, 2018) menyatakan bahwa implementasi pendidikan karakter berbasis kewarganegaraan merupakan salah satu strategi terbaik untuk mencetak generasi unggul yang menjadi motor penggerak pembangunan bangsa.

Peran Program KIPK dalam Mencapai Visi Indonesia Emas 2045

Visi Indonesia Emas 2045 adalah cita-cita yang besar bagi bangsa Indonesia untuk menjadi negara maju, adil, dan makmur pada perayaan 100 tahun kemerdekaan. Untuk mewujudkan visi ini generasi muda memegang peranan kunci sebagai penggerak utama pembangunan. KIPK memberikan bantuan finansial yang memungkinkan pelajar dari keluarga prasejahtera untuk melanjutkan pendidikan tinggi. Hal ini mendukung pemerataan akses pendidikan di seluruh lapisan masyarakat. Menurut (Prasasti & Prakoso, 2020) sendiri dalam penelitian nya Indonesia akan mengalami bonus demografi pada tahun 2045 di mana jumlah penduduk usia produktif lebih besar dibandingkan dengan penduduk usia non-produktif. Bonus demografi ini menjadi peluang besar bagi bangsa untuk mencetak sumber daya manusia yang produktif dan berdaya saing tinggi. Namun, peluang ini juga bisa menjadi ancaman apabila generasi muda tidak dipersiapkan dengan baik. Di sinilah KIPK memainkan perannya yakni memastikan bahwa generasi muda memiliki akses pendidikan yang memadai sebagai langkah awal untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Selanjutnya juga memberikan akses pendidikan KIPK juga memiliki potensi besar untuk mendukung pengembangan karakter kewarganegaraan generasi muda. Tantangan di era Revolusi Industri 4.0 memerlukan kompetensi yang lebih kompleks seperti kemampuan berpikir kritis, kreatif, adaptif, dan kolaboratif.

Dalam penelitian lainnya juga yang dilakukan oleh (Gutama et al., 2022) juga menegaskan bahwa pendidikan kewarganegaraan yang terintegrasi dengan program seperti KIPK dapat membantu generasi muda mempersiapkan diri menghadapi perubahan global dengan tetap berpegang pada nilai-nilai kebangsaan. Hal ini penting agar mereka tidak hanya unggul secara akademis, tetapi juga memiliki moralitas dan integritas yang tinggi. Selain aspek moral dan karakter penelitian oleh (Febriyanto et al., 2024) menunjukkan bahwa keberhasilan visi Indonesia Emas 2045 sangat bergantung pada peran generasi muda sebagai agen perubahan. Generasi muda yang memiliki wawasan kebangsaan yang kuat, kompetensi global, dan semangat inovasi akan menjadi pilar utama dalam keberlanjutan pembangunan bangsa. Dalam hal ini, optimalisasi KIPK menjadi langkah strategis untuk mempersiapkan generasi muda yang

siap menghadapi berbagai tantangan di masa depan. Namun, pelaksanaan KIPK juga menghadapi berbagai tantangan. Salah satu tantangan utama adalah kurangnya pemahaman di kalangan penerima manfaat tentang pentingnya pendidikan kewarganegaraan. Hal ini memerlukan pendekatan yang lebih kreatif dalam menyampaikan materi, seperti melalui platform digital, media sosial, dan pendekatan interaktif lainnya. Pemerintah juga perlu memastikan bahwa dana KIPK digunakan secara tepat sasaran dan mendukung tujuan utama program, yakni mencetak generasi muda yang berkualitas.

Langkah lain yang dapat dilakukan untuk optimalisasi KIPK adalah dengan melibatkan berbagai pihak terkait. Kerja sama antara lembaga pendidikan, pemerintah, dan masyarakat sangat penting untuk menciptakan ekosistem pendidikan yang inklusif dan berkelanjutan. Lembaga pendidikan dapat mengintegrasikan nilai kewarganegaraan dalam berbagai program akademik dan non-akademik. Pemerintah dapat memberikan dukungan kebijakan yang memadai, sementara masyarakat dapat berperan aktif dalam mendukung pendidikan generasi muda. Selain itu, KIPK juga dapat digunakan untuk mendukung kegiatan-kegiatan yang menumbuhkan jiwa kewirausahaan di kalangan generasi muda. Misalnya, melalui program pelatihan keterampilan, penerima manfaat KIPK dapat belajar bagaimana memanfaatkan teknologi untuk menciptakan peluang usaha (Gustini & Aziz, 2019). Dengan cara ini generasi muda tidak hanya menjadi pekerja akan tetapi juga pencipta lapangan kerja yang berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi bangsa.

Optimalisasi Program KIPK untuk Pendidikan Kewarganegaraan

Program Kartu Indonesia Pintar Kuliah (KIPK) merupakan salah satu kebijakan strategis pemerintah untuk meningkatkan akses pendidikan bagi generasi muda khususnya dari keluarga kurang mampu. Selain sebagai program bantuan pendidikan, KIPK memiliki potensi besar untuk menjadi instrumen dalam membangun wawasan kebangsaan generasi muda melalui pendidikan kewarganegaraan. Namun, untuk mencapai potensi tersebut diperlukan langkah-langkah optimalisasi yang strategis dan terukur. Salah satu langkah utama yang dapat dilakukan adalah mengintegrasikan materi pendidikan kewarganegaraan dengan program pengembangan kompetensi yang difasilitasi oleh KIPK. Penelitian terdahulu oleh (Prasasti & Prakoso, 2020) menunjukkan bahwa keberhasilan suatu bangsa sangat bergantung pada peran generasi mudanya. Pendidikan kewarganegaraan yang efektif dapat membentuk karakter generasi muda yang tidak hanya memiliki wawasan kebangsaan, akan tetapi juga mampu bersaing secara global.

Dengan mengintegrasikan materi kewarganegaraan ke dalam program KIPK, penerima manfaat dapat belajar bagaimana menjadi warga negara yang aktif, kritis, dan bertanggung jawab. Hal ini menjadi landasan penting dalam mencetak generasi emas yang siap menghadapi tantangan global sekaligus menjaga nilai-nilai nasionalisme. Selain itu, optimalisasi program KIPK juga memerlukan pelibatan berbagai pihak terkait seperti lembaga pendidikan, masyarakat, dan pemerintah. Koordinasi yang erat antara ketiga pihak ini sangat penting untuk mendukung implementasi pendidikan kewarganegaraan yang lebih inklusif. Misalnya, lembaga pendidikan dapat mengembangkan kurikulum yang mengintegrasikan nilai-nilai kewarganegaraan dalam

berbagai kegiatan akademik maupun non-akademik. Masyarakat dapat dilibatkan dalam beberapa program pemberdayaan yang mengajarkan pentingnya partisipasi aktif dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Sementara itu juga pemerintah dapat memainkan peran sebagai fasilitator dan pengawas dalam memastikan keberlanjutan program.

KIPK juga dapat digunakan untuk mendukung berbagai program pelatihan dan kegiatan yang menanamkan beberapa nilai kewarganegaraan. Misalnya saja pada program pelatihan kepemimpinan bagi penerima KIPK dapat dirancang untuk mengembangkan keterampilan mereka dalam memimpin, berkomunikasi, dan mengambil keputusan. Seminar kewarganegaraan dapat diadakan untuk mendiskusikan isu-isu penting terkait kebangsaan seperti pluralisme, keberagaman, dan hak asasi manusia. Selain itu, kegiatan ekstrakurikuler yang menanamkan nilai demokrasi, toleransi, dan cinta tanah air seperti simulasi sidang parlemen, debat politik, atau kegiatan sosial, juga dapat menjadi bagian dari program KIPK. Penting pula untuk memastikan bahwa adanya program yang dibentuk pemerintah ini bersifat inklusif dan relevan dengan kebutuhan generasi muda saat ini. Dalam era digital terdapat pendekatan yang inovatif seperti penggunaan media sosial, platform e-learning, dan aplikasi berbasis teknologi, dapat menjadi alat yang efektif untuk menyampaikan materi kewarganegaraan (Gustini & Aziz, 2019). Misalnya dalam hal pembuatan aplikasi edukasi yang berisi permainan interaktif, video pendek, dan kuis terkait kewarganegaraan dapat menarik minat generasi muda untuk belajar.

Tantangan dan Solusi dalam Optimalisasi Program KIPK

Meskipun Program Kartu Indonesia Pintar Kuliah (KIPK) memiliki banyak manfaat bagi pendidikan, khususnya dalam mendukung pendidikan kewarganegaraan implementasinya masih dihadapkan pada berbagai tantangan yang perlu segera diatasi. Salah satu tantangan utama adalah rendahnya pemahaman di kalangan pelajar tentang pentingnya pendidikan kewarganegaraan sebagai dasar pembentukan karakter generasi muda yang cerdas, berakarakter, dan cinta tanah air. Pendidikan kewarganegaraan sering kali dipersepsikan hanya sebagai mata pelajaran wajib tanpa memahami relevansinya dalam membangun sikap, moral, dan kesadaran kritis terhadap isu-isu kebangsaan (Kusumawardani et al., 2024). Akibatnya, banyak pelajar yang kurang termotivasi untuk mendalami materi ini sehingga tujuan pendidikan kewarganegaraan untuk mencetak generasi unggul menuju Indonesia Emas 2045 belum tercapai sepenuhnya. Selain itu, kurangnya koordinasi antara lembaga pendidikan, pemerintah, dan pihak terkait menjadi tantangan signifikan. Koordinasi yang tidak optimal mengakibatkan distribusi dana KIPK yang kurang merata menimbulkan pemanfaatan yang tidak tepat sasaran, hingga minimnya evaluasi keberlanjutan program. Beberapa institusi pendidikan juga belum memaksimalkan KIPK sebagai instrumen untuk meningkatkan kualitas pendidikan kewarganegaraan. Padahal, melalui KIPK ini sendiri siswa dari berbagai latar belakang sosial-ekonomi seharusnya dapat memperoleh kesempatan yang sama untuk mengakses pendidikan yang berkualitas termasuk dalam pembelajaran kewarganegaraan yang mampu mempersiapkan mereka sebagai pemimpin masa depan (Gutama et al., 2022).

Tantangan lainnya adalah kurangnya inovasi dalam metode pengajaran pendidikan kewarganegaraan. Pendekatan yang cenderung teoretis tanpa dikaitkan dengan

aplikasi nyata dalam kehidupan sehari-hari membuat pelajaran ini terasa kurang menarik bagi pelajar. Dalam era digital seperti saat ini penggunaan media pembelajaran yang konvensional tidak lagi cukup untuk menarik minat generasi muda. Kurangnya pelatihan bagi pendidik dalam mengintegrasikan teknologi dan pendekatan interaktif dalam pengajaran pendidikan kewarganegaraan juga menjadi kendala yang perlu segera diatasi (Gutama et al., 2022). Sehingga nantinya pemerintah dapat bekerja sama dengan institusi pendidikan dan perusahaan teknologi untuk menciptakan aplikasi atau portal khusus yang menyediakan konten-konten menarik, seperti video, simulasi, dan permainan edukasi yang membahas nilai-nilai kewarganegaraan. Melalui platform ini, pelajar dapat mempelajari pentingnya hak dan kewajiban sebagai warga negara, memahami identitas bangsa, serta mengaplikasikan nilai-nilai tersebut dalam kehidupan mereka. Serta memberikan pemahaman yang sangat penting untuk memberikan pelatihan intensif kepada pendidik agar mampu menggunakan metode pengajaran yang lebih kreatif dan relevan dengan kebutuhan zaman (Anggono & Damaitu, 2021).

Kesimpulan dan Saran

Dari pembahasan diatas maka dapat disimpulkan bahwa adanya optimalisasi Program Kartu Indonesia Pintar Kuliah (KIPK) dalam pendidikan kewarganegaraan, baik di tingkat sekolah maupun perguruan tinggi ternyata berperan signifikan dalam membentuk generasi muda yang unggul dan memiliki karakter Smart menuju tercapainya visi Indonesia Emas 2045. Terlebih adanya pembentukan program KIPK yang berasal dari pemerintah ternyata dalam segi hukum sangatlah penting serta memberikan akses pendidikan yang merata kepada generasi muda hal ini sesuai dengan undang-undang dasar, yang mana bahwasanya setiap orang berhak memperoleh pendidikan yang memungkinkan mereka untuk memahami secara mendalam hak dan kewajiban sebagai warga negara, nilai-nilai demokrasi, serta pentingnya toleransi dan integrasi bangsa. Terlebih lagi melalui pendidikan kewarganegaraan yang didukung oleh KIPK, generasi muda tidak hanya mendapatkan kesempatan untuk meningkatkan kompetensi akademik, akan tetapi juga mampu membangun karakter yang sesuai dengan nilai dan norma bangsa. Hal ini penting untuk menciptakan individu yang berpengetahuan luas, kritis, dan bertanggung jawab dalam menghadapi tantangan global dan dinamika sosial. Dengan demikian, generasi muda dapat menjadi penggerak utama dalam pembangunan bangsa yang berdaya saing tinggi.

Daftar Pustaka

- Ahmad, R. S., Noor, G. V., & Wijayanti, S. N. (2024). Persepsi Cybercommunity Terhadap Kasus Kip-K Salah Sasaran Di Indonesia Ditinjau Dari Mazhab Formal Sosiologi Hukum. *JPeHI (Jurnal Penelitian Hukum Indonesia)*, 5(1).
- Anggono, B. D., & Damaitu, E. R. (2021). Penguatan Nilai-Nilai Pancasila dlaam Pembangunan Nasional Menuju Indonesia Emas. *Pancasila : Jurnal Keindonesiaan*, 01(01).
- Aziz, A. R. (2019). Implementasi Instruksi Presiden (Inpres) No 07 Tahun 2014 tentang Kebijakan Kartu Indonesia Pintar (KIP) dalam Meningkatkan Mutu Pendidikan

- Masyarakat Miskin di Indonesia. *Jurnal Pemerintahan Dan Politik Global*, 04(02).
- Fauzi, I. (2013). *Pendidikan Kewarganegaraan (Civic Education)*. SUPERIOR “Pusat Studi Pemberdayaan Rakyat dan Transformasi Sosial” Jln.
- Febriyanto, S., Cahya, R. A., Aulia, D., Ardianty, I. D., Cahyani, P. R., & Djasuli, M. (2024). Penyalahgunaan Dana Kartu Indonesia Pintar Kuliah dan Dampaknya terhadap Pendidikan di Indonesia. *Collegium Studiosum Journal*, 7(1).
- Ghufron, M. A. (2018). Revolusi industri 4.0: tantangan, peluang dan solusi bagi dunia pendidikan. *Seminar Nasional Dan Diskusi Panel Multidisiplin Hasil Penelitian & Pengabdian Kepada Masyarakat, Jakarta*.
- Gustini, R., & Aziz, R. Z. A. (2019). *Pengembangan Model Pengambilan Keputusan Penerima Kartu Indonesia Pintar (KIP) Dengan Metode K-Means Dan Average Linkage Clustering (Studi Kasus : SMA Negeri 1 Kotagajah)*. 02(03).
- Gutama, A. S., Fedryansyah, M., & Nuriyah, E. (2022). Implementasi Program Kartu Indonesia Pintar (Kip) Berdasarkan Basis Nilai Keadilan Dalam Kebijakan Sosial. *Jurnal Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat (JPPM)*, 2(3), 389–396. <https://doi.org/10.24198/jppm.v2i3.35872>
- Kusumawardani, S. S., Budimansyan, D., Triyanto, Wibowo, W., & Copik, M. (2024). *Buku Ajar Mata Kuliah Wajib pada Kurikulum Pendidikan Tinggi Pendidikan Kewarganegaraan*. Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi.
- Prasasti, S., & Prakoso, E. T. (2020). Karakter dan Perilaku Milenial: Peluang atau Ancaman Bonus Demografi. *Onsilia: Jurnal Ilmiah BK*, 3(1).
- Rohaeni, N. E., & Saryono, O. (2018). Implementasi Kebijakan Program Indonesia Pintar (PIP) Melalui Kartu Indonesia Pintar (KIP) dalam Upaya Pemerataan Pendidikan. *IJEMAR: Indonesian Journal of Education Management and Administration Review* Doi, 2(1).
- Saryono. (2024). Pendidikan Kewarganegaraan di Era Digitalisasi 5.0: Membentuk Karakter Siswa di Sekolah Dasar. *Educatus: Jurnal Pendidikan*, 2(2).
- Sugiyono. (2013). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Alfabeta.
- Sulaiman. (2016). *Pendidikan Kewarganegaraan untuk Perguruan Tinggi*. Anggota IKAPI.
- Sulistiyawati. (2018). *Buku Ajar Metode Penelitian Kualitatif*. K-Media.
- Widiyanto, D., & Istiqomah, A. (2023). Pendidikan Kewarganegaraan Sebagai Wahana Pendidikan Demokrasi Kewarganegaraan dengan Pendidikan Demokrasi. *Jurnal Pendidikan*, 32(1).